
**REVITALISASI NILAI KEMARITIMAN DALAM PEMBELAJARAN SEJARAH
SEBAGAI UPAYA PENGUATAN KESADARAN EKOLOGIS MARITIM DALAM
MENDUKUNG SDG 14 (LIFE BELOW WATER)**

Levia Chessiagi, Leli Yulifar
Universitas Pendidikan Indonesia
Email Korespondensi: chessiagi@upi.edu

Diterima: 30 Desember 2026

Direvisi: 2 Januari 2026

Disetujui: 9 Maret 2026

ABSTRACT

History education in Indonesia has not yet optimally integrated maritime perspectives, resulting in maritime values not being optimally internalized within students' awareness. In fact, the sea plays a fundamental role in shaping the nation's historical identity and constitutes a strategic aspect in supporting the sustainability of marine ecosystems, as emphasized in Sustainable Development Goal (SDG) 14 (Life below Water). This study aims to analyze the revitalization of maritime values in history education as an effort to strengthen maritime ecological awareness. The research employs a qualitative approach using a literature review method by examining relevant scholarly resources. Data were analyzed through content analysis techniques to identify patterns, trends, and research gaps related to the integration of maritime values in history education. The findings indicate that curriculum and instructional practices of history education have not yet optimally positioned the sea as a living space with historical, social, and ecological dimensions. The revitalization or maritime values needs to be carried out through paradigm renewal in learning, the development of contextual pedagogical strategies, and the implementation of authentic assessment. Integrating maritime values into history education has the potential; to strengthen students' maritime ecological awareness and contribute to the achievement of SDG 14.

Keywords: *History Learning, Maritime Values, Maritime Ecological Awareness, SDG 14.*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia karena memiliki ribuan pulau, garis pantai panjang, dan wilayah laut yang sangat luas. Berdasarkan data dari Badan Informasi Geospasial (2024) menyatakan bahwa jumlah pulau di Indonesia sebanyak 17.380 pulau. Dilihat dari kondisi geografisnya, Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki garis pantai sekitar 81.000 km. Panjang garis pantai tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara dengan garis pantai terpanjang setelah Kanada. Letak dan kondisi geografis tersebut menjadikan Indonesia kaya akan sumber daya laut yang potensial. Selain menyimpan aneka sumber daya alam, laut tidak hanya sebatas persoalan geografis, namun elemen fundamental yang membentuk identitas, sejarah, dan peradaban sebuah bangsa (Yanto & Arif, 2023). Hal ini tercermin pada sejarah Indonesia yang memanfaatkan laut sebagai jalur migrasi, perdagangan, dan interaksi budaya, dan kekayaan alam yang mendukung kehidupan masyarakat.

Jika ditinjau secara historis, Indonesia memiliki pengaruh yang sangat kuat dalam mendominasi wilayah Asia Tenggara. Posisi strategis Indonesia di sepanjang rute perdagangan atau jalur rempah telah menunjukkan bahwa penghuni Nusantara merupakan pelaut ulung. Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit merupakan dua contoh dan bukti akar Indonesia sebagai

negara maritim, kedua kerajaan tersebut merupakan puncak kejayaan maritim yang menjadikan lautan sebagai penghubung kekuasaan. Kekuasaan maritim Sriwijaya mulai dari Selat Karimata, Selat Sunda, Selat Bangka - Riau - Lingga, Selat Malaka dan sebagian Samudera Hindia, penguasaan tersebut tentu memiliki nilai kestrategisan dalam dunia maritim pada masa abad VII - X M (Coedes, 2014; Sulistiyono, 2016). Kemudian menurut Darmanto & Suryo (2014) keistimewaan Kerajaan Majapahit adalah pada kemampuannya menyinergikan tradisi pelayaran-perniagaan sungai dan tradisi agraris dengan potensi kemaritiman yang telah dikuasainya melalui tradisi kemaritiman Kediri.

Paradigma maritim atau yang disebut sebagai wawasan bahari atau wawasan Nusantara merupakan konsep pembangunan yang didasarkan pada jati diri bangsa Indonesia sebagai bangsa maritim bersumber dari perjalanan sejarah sebagai komunitas bangsa (Sarjito, 2024). Namun dalam perkembangannya, paradigma ini mengalami pergeseran orientasi akibat penjajahan dan modernisasi yang berfokus pada pembangunan darat. Sejak masa kolonialisme, aktivitas masyarakat dialihkan ke pusat-pusat administrasi dan perkebunan. Praktik maritim tradisional di Indonesia berubah secara signifikan sebagai akibat dari pengenalan sistem tanam paksa oleh Belanda pada abad ke-19. Di bawah sistem ini, petani pribumi dipaksa untuk menanam komoditas yang laku di pasar dunia seperti kopi, gula, dan nila untuk diekspor. Pergeseran ke arah budidaya tanaman komersial ini mengganggu kegiatan pertanian dan perikanan subsisten tradisional, yang merupakan bagian integral dari mata pencaharian banyak masyarakat maritim (Sarjito, 2024). Akibatnya, laut tidak lagi dipersepsikan sebagai ruang penghubung dan sumber kekuatan politik dan ekonomi. Praktik tersebut secara sistematis telah menggeser pusat kehidupan masyarakat dari laut ke agraris. Selanjutnya, dalam konteks masa kini, maraknya eksploitasi sumber daya kelautan yang tanpa memperhatikan dampak ekologis pembangunan berkelanjutan mencerminkan bahwa lemahnya kesadaran ekologis masyarakat terhadap laut sebagai ekosistem kehidupan. Fenomena ini sejalan dengan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (2025) yang menunjukkan bahwa praktik IUU Fishing (*Illegal, Unreported, Unregulated*) terus terjadi di banyak wilayah laut yang berdampak pada ekonomi, namun juga mengakibatkan kerusakan terhadap habitat, seperti terumbu karang, padang lamun, dan wilayah pemijahan akibat praktik tangkap destruktif yang mempercepat degradasi ekosistem laut. Akibatnya, kerugian yang ditimbulkan pada tahun 2021 mencapai Rp101 triliun per tahun.

Pada saat ini, sistem pendidikan nasional masih belum mengintegrasikan narasi kemaritiman di dalam kurikulum secara optimal. Narasi sejarah maritim seharusnya dapat menjadi media untuk menanamkan identitas dan rasa memiliki terhadap laut, namun pada kenyataannya sejarah maritim belum mendapatkan ruang yang memadai dalam pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu, diperlukan revitalisasi nilai-nilai maritim pada pembelajaran di sekolah. Urgensi revitalisasi nilai-nilai kemaritiman ini semakin relevan dengan tujuan program *Sustainable Development Goal* (SDG), khususnya pada poin 14 (*Life Below Water*) yang menekankan konservasi dan pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut dan ekosistem pesisir (United Nation, n.d.). Pencapaian tujuan tersebut tidak hanya dapat diimplementasikan melalui kebijakan dan teknologi, tetapi juga pada perubahan kesadaran dan perilaku manusia terhadap laut. Dalam konteks ini, pendidikan memiliki peran kunci untuk menanamkan nilai dan kesadaran ekologis yang sejalan dengan tujuan SDG 14.

Dalam konteks ini, pembelajaran sejarah di sekolah memiliki peranan penting karena dapat menjadi medium dalam menyampaikan dan mengedukasi peserta didik mengenai nilai-nilai kemaritiman. Nilai-nilai yang diajarkan dalam pembelajaran sejarah untuk menumbuhkan kesadaran ekologis mencakup: tanggung jawab ekologis, komitmen terhadap keberlanjutan pemanfaatan sumber daya laut, serta kepedulian dan partisipasi dalam pelestarian laut. Nilai-nilai ini dapat dibangun melalui materi sejarah yang menghubungkan praktik masa lalu dan data kontemporer, seperti temuan bahwa terumbu karang mengalami degradasi akibat tekanan lingkungan (Susanti et al., 2025). Temuan tersebut dapat diintegrasikan secara kontekstual dalam pembelajaran sejarah, khususnya pada materi yang berhubungan dengan maritim di Indonesia seperti jalur perdagangan. Melalui materi tersebut, peserta didik diajak untuk menganalisis perubahan cara manusia memanfaatkan laut dari masa ke masa serta dampaknya terhadap kondisi ekosistem saat ini.

Kajian mengenai sejarah maritim dan pendidikan lingkungan yang membahas mengenai perubahan paradigma kemaritiman telah berkembang, kajian tersebut umumnya masih ditempatkan dalam konteks kebijakan, ekonomi, dan geopolitik. Integrasi revitalisasi kemaritiman ke dalam pembelajaran sejarah sebagai strategi menumbuhkan kesadaran ekologis yang sesuai dengan agenda SDG 14 masih terbatas. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk merevitalisasi nilai-nilai kemaritiman dalam pembelajaran sejarah untuk menumbuhkan kesadaran ekologis maritim peserta didik. Melalui integrasi tersebut, peserta didik diharapkan tidak hanya sekadar memahami kejayaan maritim masa lalu, namun dapat menginternalisasikan tanggung jawab ekologis terhadap masa depan kelautan Indonesia. Selain itu, upaya ini pula sejalan dengan agenda SDG 14 yang menekankan pemanfaatan laut secara berkelanjutan, serta mendukung pembangunan karakter generasi muda yang lebih peduli terhadap keberlanjutan ekosistem laut.

METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (*library research*). Metode ini dipilih dengan tujuan untuk menghimpun, mengkaji, dan sintesis gagasan, temuan, serta kerangka konseptual dari berbagai sumber ilmiah yang relevan dengan nilai-nilai kemaritiman, pembelajaran sejarah, kesadaran ekologis kelautan, dan SDG 14 (*Life Below Water*). Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dan konseptual, dengan fokus pada penelaahan kritis untuk mengidentifikasi pola pemikiran, kecenderungan kajian, serta *research gap* yang berkaitan dengan integrasi nilai kemaritiman dalam pembelajaran sejarah.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran sumber pustaka yang dilakukan secara sistematis melalui Google Scholar, portal jurnal nasional terakreditasi SINTA, portal jurnal internasional terindeks Scopus Q2, serta laman resmi lembaga pemerintah dan organisasi internasional, seperti Badan Informasi Geospasial dan United Nations. Literatur yang dikaji mencakup artikel ilmiah hasil penelitian empiris, artikel konseptual, serta buku ilmiah yang memiliki relevansi dengan tema pembelajaran sejarah, nilai-nilai kemaritiman, kesadaran ekologis, dan agenda pembangunan maritim berkelanjutan. Artikel jurnal diprioritaskan karena mempresentasikan perkembangan kajian mutakhir, sementara buku digunakan sebagai rujukan konseptual dan historis untuk memperkuat kerangka teoretis. Batasan tahun publikasi yang digunakan pada penelitian ini adalah 2015-2025, guna memastikan relevansi dengan

perkembangan kajian kontemporer. Namun demikian, beberapa literatur terbitan sebelum periode tersebut tetap digunakan secara selektif karena memiliki nilai fundamental dan historis dalam menjelaskan paradigma kemaritiman dan pembelajaran sejarah di Indonesia Seluruh literatur yang dipilih kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema dan fokus kajian untuk dianalisis yang diklasifikasikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. Klasifikasi Literatur yang Digunakan

No.	Tema Kajian Utama	Fokus Kajian	Jenis Literatur	Sumber
1	Sejarah Maritim dan Identitas Bangsa	Sejarah maritim Indonesia sebagai pembentuk identitas dan peradaban bangsa	Artikel penelitian	Ahmad (2017), Yanto & Arif (2023), Pranoto et al. (2025)
2	Paradigma Kemaritiman	Perubahan paradigma maritim dalam pembangunan dan pembelajaran sejarah	Artikel konseptual & penelitian	Sulistiyo (2016), Nurhayati et al. (2023a)
3	Pembelajaran Sejarah	Strategi, evaluasi, dan peran pembelajaran sejarah dalam pendidikan	Artikel penelitian	Nurhakim & Fahrudin (2022), Pranoto et al. (2025)
4	Integrasi Nilai Kemaritiman dalam Pendidikan	Integrasi nilai dan budaya maritim dalam kurikulum dan bahan ajar sejarah	Artikel penelitian	Rohmawati et al. (2025), Subagja et al. (2025)
5	Kesadaran Ekologis dan Pendidikan Lingkungan	Pendidikan Lingkungan dan pembelajaran sejarah berwawasan lingkungan	Artikel penelitian	Anggraini et al. (2025), Sudarto et al. (2025)
6	Kolonialisme dan Transformasi Budaya Maritim	Dampak kolonialisme terhadap praktik dan identitas kemaritiman	Artikel penelitian	Sarjito (2024), Darmanto & Suryo (2014)
7	Kurikulum dan Kebijakan Pendidikan	Peran guru dan kebijakan kurikulum dalam pengembangan nilai	Artikel konseptual	Anggraini et al. (2022)
8	Literasi dan Kompetensi Peserta Didik	Pengembangan keterampilan berpikir kritis dan literasi	Artikel penelitian	Phimphimon et al. (2024)
9	Kemaritiman dan Pembangunan Berkelanjutan	Keterkaitan nilai kemaritiman dengan ketahanan nasional dan SDGs	Dokumen resmi	United Nations (n.d.)
10	Data Geografis dan Kelautan Indonesia	Kondisi geografis dan potensi kelautan Indonesia	Dokumen resmi	Badan Informasi Geospasial (2024), Kementerian Kelautan dan Perikanan (2025)

Analisis data dilakukan menggunakan analisis isi (*content analysis*) yaitu dengan melakukan identifikasi atau reduksi data, yaitu memilah literatur yang relevan dengan tujuan penelitian; kemudian melakukan kategorisasi tema, yaitu melakukan klasifikasi tema nilai kemaritiman, pembelajaran sejarah, dan SDG 14; langkah selanjutnya melakukan interpretasi dokumen untuk menemukan hubungan konseptual antarkategori; dan langkah terakhir yaitu melakukan sintesis konseptual untuk merevitalisasi nilai kemaritiman untuk penguatan kesadaran ekologis kelautan. Dengan metode kajian literatur ini, penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai peran pembelajaran sejarah sebagai wahana pembentukan kesadaran historis, identitas kebangsaan, dan karakter peserta didik melalui pemahaman yang berorientasi pada kemaritiman. Orientasi kemaritiman ini memungkinkan peserta didik memahami peran laut dan pembentukan peradaban bangsa sekaligus merefleksikan tantangan kontemporer terkait keberlanjutan ekosistem kelautan, khususnya dalam mendukung penguatan kesadaran ekologis maritim dan pencapaian SDG 14.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hambatan Pembelajaran Sejarah Maritim

Dalam pelaksanaannya, implementasi nilai kemaritiman dalam praktik pembelajaran sejarah mempresentasikan bagaimana sejarah diposisikan sebagai medium dalam pembentukan kesadaran identitas dan relasi manusia dengan ruang maritim sebagai bagian integral dari perjalanan sebuah bangsa. Berdasarkan hasil kajian literatur, pembelajaran sejarah di Indonesia menunjukkan kecenderungan masih menempatkan laut secara terbatas dalam kerangka narasi historis, Ahmad (2017) mengungkapkan bahwa materi kemaritiman di sekolah belum tereksplor secara maksimal. Dalam hal ini, posisi laut hanya ditempatkan sekadar sebagai batas geografis atau jalur perlintasan, bukan sebagai ruang hidup yang membentuk dinamika sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat. Pada struktur kurikulum, khususnya pada Kurikulum Merdeka, menawarkan pendekatan yang fleksibel menyesuaikan dengan kebutuhan peserta didik, berpusat pada peserta didik, dan adaptif dengan konteks lokal. Salah satu ciri utama Kurikulum Merdeka adalah penekanan pada pengembangan karakter, kemampuan berpikir kritis, dan pengalaman belajar yang kontekstual dan bermakna (Rohmawati et.al., 2025). Fleksibilitas Kurikulum Merdeka dapat dimanfaatkan oleh guru untuk memaksimalkan materi sejarah maritim di kelas, pendekatan yang adaptif dengan konteks lokal dapat menjadi peluang besar, khususnya bagi daerah-daerah pesisir, untuk mengintegrasikan pembelajaran dengan sumber daya laut yang ada di wilayahnya.

Dalam konteks materi ajar dalam buku teks sejarah, muatan sejarah maritim belum menjadi perhatian utama. Materi seperti jalur rempah, perdagangan pada masa kerajaan Hindu-Buddha dan Islam, VOC dan penguasaan jalur laut, serta Deklarasi Djuanda. Namun, jika dibandingkan dengan materi sejarah politik dan teritorial daratan. Laut lebih sering diposisikan sebagai sarana mobilitas dan ekspansi kekuasaan, bukan sebagai ruang ekologis yang memiliki dinamika lingkungan dan konsekuensi keberlanjutan. Pada narasi historis jalur rempah, pembelajaran sejarah umumnya menekankan aspek ekonomi dan jaringan perdagangan antar kawasan. Sementara refleksi kritis terhadap kearifan lokal masyarakat pesisir dalam menjaga keberlanjutan wilayah laut dan pesisir belum banyak diintegrasikan. Padahal, berbagai kajian menunjukkan bahwa komunitas pesisir secara historis memiliki sistem pengetahuan lokal yang

mengatur pemanfaatan sumber daya laut secara kolektif dan berkelanjutan. Di wilayah Maluku, terdapat praktik sasi laut yang telah lama diterapkan sebagai mekanisme adat untuk membatasi waktu dan cara pemanfaatan sumber daya laut guna mencegah eksploitasi berlebihan (Betaubun et al., 2019). Sementara di Aceh dikenal sistem Panglima Laot yang berfungsi mengatur wilayah tangkap, musim melaut, serta penyelesaian konflik nelayan berbasis hukum adat maritim (Taufik & Lailatussaadah, 2020). Praktik serupa juga ditemukan dalam sistem awig-awig masyarakat pesisir Lombok yang mengatur pemanfaatan ekosistem pesisir dan laut secara komunal (Setiyono, 2016). Kondisi serupa juga terlihat dalam materi Deklarasi Djuanda yang umumnya disajikan sebagai tonggak penting dalam pengakuan kedaulatan wilayah laut Indonesia. Meskipun materi tersebut memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai pintu masuk diskursus tentang tanggung jawab pengelolaan dan pelestarian ruang laut nasional, materi ini sering kali berhenti pada aspek yuridis dan geopolitik. Hal tersebut mengakibatkan peluang untuk mengintegrasikan nilai kemaritiman yang berorientasi pada kesadaran ekologis maritim belum dioptimalkan dalam pembelajaran sejarah. Nilai-nilai maritim yang diintegrasikan meliputi tanggung jawab ekologis dalam pemanfaatan sumber daya laut, prinsip keberlanjutan, dan partisipasi dalam melestarikan laut. Nilai-nilai tersebut tercermin dalam praktik kearifan lokal masyarakat pesisir yang memungkinkan peserta didik memahami bahwa kesadaran ekologis maritim bukanlah sebuah konsep baru, melainkan bagian dari pengalaman historis dan budaya masyarakat maritim Indonesia.

Selanjutnya, selain kurikulum dan buku ajar, terdapat hambatan-hambatan yang terjadi ketika pelaksanaan pembelajaran sejarah maritim dilakukan. Menurut Ahmad (2017) menjelaskan bahwa terdapat tiga permasalahan yang menjadi hambatan dalam implementasi praktik pembelajaran sejarah maritim, yaitu; 1) ditinjau dari aspek historiografis, terjadi ketertinggalan penulisan sejarah maritim dibanding penulisan pada aspek sejarah yang lain; 2) ditinjau dari aspek pedagogis, seperti kebijakan, faktor guru, media dan sumber belajar, dan faktor peserta didik; 3) ditinjau dari aspek geografis, perbedaan kawasan dan kultural yang mengakibatkan adanya masalah untuk membangun kontekstualisasi dan visualisasi, misalnya pada peserta didik yang tinggal di wilayah pegunungan atau pedalaman.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa praktik pembelajaran sejarah belum sepenuhnya mengimplementasikan nilai kemaritiman secara optimal. Kurikulum Merdeka secara konseptual memberikan ruang fleksibilitas bagi penguatan pembelajaran kontekstual dan pengembangan karakter peserta didik, potensi tersebut belum sepenuhnya dimanfaatkan untuk memberikan ruang kepada sejarah maritim sebagai perspektif utama dalam pembelajaran sejarah. Dominasi materi yang masih berorientasi pada daratan, keterbatasan muatan dan pendekatan sejarah maritim dalam buku teks, serta berbagai hambatan historiografis, pedagogis, dan geografis menunjukkan bahwa nilai kemaritiman belum berfungsi sebagai kerangka historis yang mampu membentuk kesadaran ekologis maritim peserta didik. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara arah kebijakan kurikulum dan implementasi di ruang kelas, sekaligus menegaskan urgensi untuk melakukan revitalisasi nilai kemaritiman melalui strategi pembelajaran sejarah yang lebih reflektif, kontekstual, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Revitalisasi Nilai Kemaritiman melalui Pengembangan Strategi Pembelajaran Sejarah

Revitalisasi nilai kemaritiman dalam mata pelajaran sejarah di sekolah dapat dilakukan dengan mengembangkan strategi pembelajaran yang mampu mengaitkan narasi historis dengan konteks sosial dan ekologis kontemporer. Sulistiyono (2016) menyatakan bahwa eksplorasi sejarah maritim pada kurikulum pendidikan di Indonesia masih minim. Dalam hal ini, guru dapat mengembangkan materi dengan menelusuri dinamika historis pemanfaatan ruang laut, dampak ekologis aktivitas manusia, serta nilai-nilai budaya bahari yang berkembang dalam masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, pendekatan sejarah dengan lingkungan menjadi relevan karena memungkinkan peserta didik memahami relasi jangka panjang antara manusia dan laut dalam perspektif keberlanjutan. Pranoto et al. (2025) menyatakan bahwa pendidikan sejarah memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan jiwa nasionalisme dan patriotisme. Materi-materi sejarah mengandung pesan moral yang membantu peserta didik mengembangkan rasa hormat terhadap nilai-nilai kebangsaan dan membentuk karakter positif. Melalui pembelajaran sejarah, nilai-nilai kemaritiman dapat dikonstruksi sebagai bagian dari narasi identitas bangsa, sekaligus sebagai landasan etis dalam memaknai laut sebagai ruang hidup yang harus dijaga keberlanjutannya.

Revitalisasi nilai kemaritiman memerlukan perubahan paradigma terhadap laut dalam pembelajaran sejarah (Nurhayati et al., 2023). Perubahan paradigma ini berarti berupaya menempatkan laut sebagai ruang produksi sejarah yang mempengaruhi pola ekonomi, relasi kekuasaan, teknologi, budaya, dan bahkan struktur sosial masyarakat. Selain itu, revitalisasi nilai kemaritiman juga menyentuh aspek historiografis, yakni cara sejarah maritim ditulis, dipilih, dan disajikan dalam pembelajaran. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya bahwa menurut Ahmad (2017) keterbatasan historiografi merupakan salah satu faktor penghambat dalam proses penyampaian pembelajaran sejarah maritim di sekolah. Historiografi sejarah maritim dapat diperluas dengan memasukkan sejarah lisan masyarakat pesisir, kearifan lokal bahari, arsip visual, peta pelayaran, atau artefak maritim sebagai sumber sejarah. Pada praktiknya, guru dapat mengimplementasikan hal tersebut dengan meninjau kembali tujuan pembelajaran yang dibuat. Pada Kurikulum Merdeka, guru dapat merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik disesuaikan dengan tujuan kurikulum dan karakteristik mata pelajaran dan peserta didik serta keadaan kelas (Anggraini et.al. 2022). Dalam hal ini, guru dapat mengintegrasikan nilai kemaritiman pada materi sejarah yang relevan atau memasukkan nilai kemaritiman ke dalam tujuan pembelajaran. Selanjutnya, pada proses pembelajaran sejarah di kelas, guru dapat menggunakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, seperti *inquiry learning*, *problem based learning*, dan *discovery learning* yang menuntut peserta didik untuk menelusuri sumber, membangun argumen berbasis bukti, serta mendiskusikan berbagai kepentingan yang terlibat dalam pemanfaatan ruang laut. Guru juga dapat memadukan teknologi untuk penyampaian materi sejarah maritim menanamkan nilai kemaritiman yang terintegrasi dalam proses pembelajaran. Subagja et.al. (2025) melakukan penelitian dan menemukan bahwa penggunaan Aplikasi Museum Digital Maritim memungkinkan peserta didik untuk membangun pengetahuan mereka secara aktif melalui pendekatan inkuiri. Hal tersebut menunjukkan bahwa merancang pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan mengintegrasikan teknologi dapat meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi kemaritiman dan pemahaman konseptual peserta didik.

Aspek lain yang dapat dilakukan untuk merevitalisasi nilai kemaritiman pada pembelajaran sejarah adalah penilaian pembelajaran. Selama ini, sebagian besar evaluasi yang digunakan di sekolah masih berfokus pada hafalan dan pemahaman fakta sejarah, yang kurang memadai dalam menilai kemampuan analitis dan evaluatif peserta didik (Nurhakim dan Fahrudin, 2025). Selanjutnya Phimpimon et.al. (2024) menyatakan bahwa penilaian tradisional sering kali tidak memadai untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi secara komprehensif, sehingga penting untuk mengembangkan instrumen asesmen autentik yang lebih tepat sasaran. Oleh karena itu, revitalisasi perlu diarahkan pada pengembangan asesmen autentik, seperti portofolio, proyek berbasis riset lokal, analisis sumber sejarah, dan produk argumentatif yang mengaitkan sejarah maritim dengan isu kontemporer. Sistem penilaian seperti ini memungkinkan nilai kemaritiman tidak hanya diukur dari aspek kognitif, namun kemampuan peserta didik dalam merefleksikan apa yang telah dipelajarinya untuk membangun kesadaran ekologis. Selanjutnya, revitalisasi nilai kemaritiman perlu ditempatkan dalam pembelajaran yang lebih luas. Sekolah tidak dapat berdiri sendiri dalam membangun kesadaran maritim, melainkan perlu terhubung dan dukungan dengan lingkungan sosial dan kultural di sekitarnya. Sekolah dapat melakukan kerja sama dengan komunitas pesisir, museum, pelabuhan, dan lembaga terkait yang dapat memperkaya pengalaman belajar peserta didik.

Dengan demikian, revitalisasi nilai kemaritiman melalui pengembangan strategi pembelajaran sejarah merupakan bagian integral dari upaya pendidikan yang lebih luas dalam membangun kesadaran ekologis. Revitalisasi nilai kemaritiman dalam pembelajaran sejarah dapat dilakukan dengan pembaruan paradigma, perluasan historiografi, pengembangan tujuan pembelajaran, inovasi pedagogi, reformulasi sistem asesmen, serta penguatan lingkungan belajar peserta didik. Melalui upaya revitalisasi ini, pembelajaran sejarah memiliki potensi strategis untuk membentuk kesadaran maritim yang kritis, reflektif, dan berorientasi pada keberlanjutan.

Implikasi Pendidikan Sejarah dalam Mendukung SDG 14

SDG 14 merupakan salah satu dari 17 tujuan pembangunan berkelanjutan sumber daya laut dan kelautan. SDG 14 bertujuan untuk melestarikan dan memanfaatkan lautan, samudra, dan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan yang berkelanjutan (United Nations, n.d.). Dalam konteks negara kepulauan seperti Indonesia, SDG 14 memiliki signifikansi strategis karena keberlanjutan laut secara langsung berkaitan dengan ketahanan pangan, mata pencaharian masyarakat, dan identitas nasional. Secara substantif, SDG 14 memiliki beberapa target, yaitu:

- 14.1 Mencegah dan secara signifikan mengurangi pencemaran laut dari segala jenis pencemaran, khususnya yang berasal dari kegiatan berbasis darat, termasuk sampah laut dan pencemaran nutrisi.
- 14.2 Mengelola dan melindungi ekosistem laut dan pesisir secara berkelanjutan untuk menghindari dampak merugikan yang signifikan, termasuk dengan memperkuat ketahanannya, serta mengambil tindakan pemulihan guna mewujudkan laut yang sehat dan produktif.
- 14.3 Meminimalkan dan menangani dampak pengasaman laut, termasuk melalui peningkatan kerja sama ilmiah di semua tingkatan.

- 14.4 Secara efektif mengatur kegiatan penangkapan ikan dan mengakhiri penangkapan berlebih, penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur (IUU fishing), serta praktik penangkapan ikan yang merusak, dan menerapkan rencana pengelolaan berbasis ilmu pengetahuan guna memulihkan stok ikan dalam waktu sesingkat mungkin, setidaknya hingga tingkat yang dapat menghasilkan hasil tangkapan berkelanjutan maksimum sesuai dengan karakteristik biologisnya.
- 14.5 Melestarikan sedikitnya 10 persen wilayah pesisir dan laut, sesuai dengan hukum nasional dan internasional serta berdasarkan informasi ilmiah terbaik yang tersedia.
- 14.6 Pada tahun 2020, melarang bentuk-bentuk subsidi perikanan tertentu yang berkontribusi terhadap kelebihan kapasitas dan penangkapan berlebih, menghapus subsidi yang mendorong praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur, serta menahan untuk tidak memperkenalkan subsidi baru yang serupa, dengan mengakui bahwa perlakuan khusus dan berbeda yang tepat dan efektif bagi negara berkembang dan kurang berkembang menjadi bagian integral dari negosiasi subsidi perikanan di *World Trade Organization*.
- 14.7 Pada tahun 2030, meningkatkan manfaat ekonomi bagi negara-negara kepulauan kecil berkembang (*small island developing states*) dan negara-negara kurang berkembang dari pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan, termasuk melalui pengelolaan perikanan, akuakultur, dan pariwisata yang berkelanjutan.

Target yang tercantum pada SDG 14 serta kaitannya dengan penguatan nilai kemaritiman pada pembelajaran sejarah, memberikan kerangka normatif yang dapat digunakan sebagai dasar bagi generasi muda untuk memahami nilai kemaritiman untuk dapat secara sadar menjalankan agenda SDG 14 melalui kesadaran ekologis. Kesadaran ekologis maritim yang dibangun melalui revitalisasi nilai kemaritiman dalam pembelajaran sejarah memiliki implikasi langsung terhadap pencapaian SDG 14 (*Life Below Water*), terutama dalam membentuk paradigma baru, sikap, dan orientasi tindakan generasi muda terhadap laut. SDG 14 pada hakikatnya tidak hanya fokus pada intervensi teknis dan kebijakan, tetapi juga transformasi kesadaran manusia dalam memaknai laut sebagai sistem kehidupan yang rentan dan terbatas. Oleh karena itu, kesadaran ekologis menjadi prasyarat yang penting bagi keberhasilan implementasi SDG 14.

Implikasi dari kesadaran ekologis adalah terbentuknya pemahaman historis tentang akar persoalan degradasi laut yang menjadi sasaran utama SDG 14. Melalui pembelajaran sejarah yang berwawasan lingkungan memungkinkan peserta didik memahami bahwa kerusakan lingkungan dan dampak ekologis merupakan hasil dari rangkaian proses historis yang dipicu oleh aktivitas manusia di masa lalu (Anggraini et.al. 2025). Pola eksploitasi kolonial, modernisasi ekonomi maritim, dan paradigma pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi telah membentuk relasi antara manusia dan laut yang eksploitatif. Selanjutnya, kesadaran ekologis yang terbentuk dari proses pembelajaran sejarah memungkinkan peserta didik memahami bahwa perlindungan ekosistem laut tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab moral antargenerasi. Perspektif ini selaras dengan semangat SDG 14 yang menekankan keberlanjutan jangka panjang.

Implikasi berikutnya berkaitan dengan pembentukan kesadaran kewargaan ekologis (*ecological citizenship*). SDG 14 menempatkan partisipasi masyarakat sebagai elemen penting dalam pengelolaan dan perlindungan laut. Pendekatan pembelajaran yang reflektif dan

kontekstual yang mengakar pada konteks budaya dan sejarah, memungkinkan terbentuknya kesadaran ekologis yang tidak hanya bersifat normatif tetapi juga bermakna secara kultural (Sudarto et.al. 2025). Melalui pembelajaran sejarah yang kritis dan reflektif, peserta didik didorong untuk mendukung kebijakan perlindungan laut, memperjuangkan keadilan akses sumber daya, serta mengawasi praktik eksploitasi yang merusak. Selain itu, peserta didik juga dapat mengintegrasikan dimensi lokal dan global dalam memahami dan mengimplementasikan agenda SDG 14. Pembelajaran sejarah yang syarat dengan nilai kemaritiman memungkinkan peserta didik untuk mengaitkan persoalan dan masalah konkret yang ada di wilayahnya, seperti pencemaran pantai, konflik nelayan atau kerusakan mangrove dengan agenda global yang tertuang pada SDG 14. Dengan begitu, implementasi agenda SDG 14 akan terasa lebih relevan dengan pengalaman peserta didik sesuai dengan apa yang telah dipelajarinya di sekolah. Kesadaran tersebut menjadi fondasi penting dalam mendukung pencapaian SDG 14 (*Life Below Water*), melalui penguatan pemahaman generasi muda terhadap ekosistem laut secara utuh.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil temuan, penelitian ini menunjukkan bahwa revitalisasi nilai kemaritiman dalam pembelajaran sejarah memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran ekologis maritim yang relevan dengan tantangan pembangunan yang memfokuskan pada keberlanjutan. Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pembelajaran sejarah selama ini masih didominasi oleh orientasi darat-sentris yang belum sepenuhnya mampu menempatkan laut sebagai ruang yang memiliki dimensi historis, sosial, dan ekologis. Akibatnya, nilai kemaritiman cenderung hadir secara simbolik, yakni sebatas penyebutan laut dalam narasi sejarah tanpa diikuti dengan pembahasan kritis mengenai relasi manusia dengan laut, praktik pemanfaatan sumber daya kelautan, serta implikasinya terhadap keberlanjutan ekosistem laut dan belum terinternalisasi secara reflektif dalam kesadaran peserta didik.

Revitalisasi nilai kemaritiman melalui pengembangan strategi pembelajaran sejarah perlu dipahami sebagai proses multidimensional yang mencakup pembaruan paradigma, perluasan historiografi, pengembangan tujuan pembelajaran, inovasi pedagogi, reformulasi sistem penilaian. Pendekatan ini memungkinkan pembelajaran sejarah berfungsi sebagai wahana pembentukan kesadaran historis dan ekologis yang saling terintegrasi, sehingga peserta didik mampu memahami keterkaitan antara dinamika masa lalu, persoalan kelautan masa kini, dan tanggung jawab keberlanjutan di masa depan.

Kesadaran ekologis yang dibangun melalui pembelajaran sejarah berimplikasi langsung terhadap pencapaian SDG 14. Kesadaran ekologis tersebut mendorong terbentuknya cara pandang kritis terhadap akar historis degradasi laut, penguatan etis dalam pemanfaatan sumber daya kelautan, serta tumbuhnya kesadaran bahwa pelestarian ekosistem laut merupakan tanggung jawab kolektif. Berdasarkan simpulan tersebut, sejarah memiliki posisi strategis sebagai instrumen kultural dalam mendukung keberlanjutan ekosistem laut melalui pembentukan kesadaran ekologis peserta didik sebagai generasi muda. Revitalisasi nilai kemaritiman dalam pembelajaran sejarah bukan hanya berkontribusi sebagai penguat identitas maritim bangsa, namun sebagai upaya jangka panjang untuk membentuk relasi manusia dan laut yang lebih adil, reflektif, dan berkelanjutan sesuai dengan semangat SDG 14.

REFERENSI

- Ahmad, T. A. (2017). Urgensi dan Relevansi Pembelajaran Sejarah Maritim untuk Wilayah Pedalaman. *Paramita: Historical Studies Journal*, 27(1).
- Aliyah, S., Pranoto, R. A., Agustin, E. R., & Trisetiyoko, D. (2025). Peran sejarah dalam pembentukan karakter dan identitas bangsa. *Pedagogi: Jurnal Ilmiah Pendidikan*, 11(1), 64–74. <https://doi.org/10.47662/pedagogi.v11i1.952>
- Anggraini, D. L., Yulianti, M., Nurfaizah, S., & Pandiangan, A. P. B. (2022). Peran Guru dalam Mengembangkan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Sosial*, 1(3), 290–298. <https://doi.org/10.58540/jipsi.v1i3.53>
- Anggriani, N. K., Supriatna, N., & Tarunasena, T. (2025). Pembelajaran Sejarah Berwawasan Lingkungan sebagai upaya Menumbuhkan Kesadaran Lingkungan Siswa SMA. *Fajar Historia: Jurnal Ilmu Sejarah Dan Pendidikan*, 9(2), 307–321. <https://doi.org/10.29408/fhs.v9i2.31610>
- Badan Informasi Geospasial. (2024). *Rilis Jumlah Pulau Indonesia*. https://www.big.go.id/uploads/downloads/dokumen/Rilis_Jumlah_Pulau.Pdf
- Betaubun, A. D. S., Laiyanan, S. E. B., Renyaan, D., & Pentury, F. (2019). Persepsi Penerapan Sasi Laut di Wilayah Perairan Kepulauan Kei: Upaya Mendukung Keberlanjutan Sumber Daya Laut. *Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan*, 12(1), 136. <https://doi.org/10.29239/j.agrikan.12.1.136-144>
- Coedes, G. (2014). Prasasti berbahasa Melayu Kerajaan Srivijaya. In G. Coedes, L.-C. Damais, H. Kulke, & P.-Y. Manguin (Eds.), *Kedatuan Sriwijaya* (pp. 45–88).
- Darmanto, & Suryo, D. (2014). *Peran DIY dalam NKRI yang berbudaya maritim agraris niaga (MAN)*. Amara Books.
- Habib Akbar Nurhakim, & Fahrudin. (2022). Evaluasi program pembelajaran sejarah daring dengan model CIPP. *Jurnal Evaluasi Pendidikan*, 13(2), 111–118. <https://doi.org/10.21009/jep.v13i2.27456>
- Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. (2025). *Nelayan terancam, laut terluka: Dampak IUU fishing bagi masyarakat dan ekosistem*. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan.
- Nurhayati, E. S., Widodo, W., Said, B. D., Widodo, P., & Saragih, H. J. R. (2023a). Membangun Paradigma Maritim Melalui Pembelajaran Sejarah Kemaritiman Untuk Mendukung Paradigma Pembangunan Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 11(2), 155–161. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v11i2.10190>
- Nurhayati, E. S., Widodo, W., Said, B. D., Widodo, P., & Saragih, H. J. R. (2023b). Membangun Paradigma Maritim Melalui Pembelajaran Sejarah Kemaritiman Untuk Mendukung Paradigma Pembangunan Indonesia. *Equilibrium: Jurnal Pendidikan*, 11(2), 155–161. <https://doi.org/10.26618/equilibrium.v11i2.10190>
- Phimphimon, N., Intasena, A., Srimunta, T., & Khantasiri, P. (2024). Improving Critical Reading Abilities in 10th Graders: An Active Learning Approach. *International Journal of Learning, Teaching and Educational Research*, 23(3), 186–198. <https://doi.org/10.26803/ijlter.23.3.10>
- Rohmawati, U. S. (2025). Integration of Maritime Values into the Indonesian History Education Curriculum. *ISTORIA: Jurnal Pendidikan Dan Ilmu Sejarah*, 21(2). <https://doi.org/10.21831/istoria.v21i2.88841>

- Sarjito, A. (2024). Dampak Penjajahan Belanda terhadap Budaya Maritim Indonesia dan Transformasi Identitas Nasional. *Research Review: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 3(1), 45–54. <https://doi.org/10.54923/researchreview.v3i1.69>
- Setiyono, E. (2016). Pengelolaan Sumberdaya Pesisir Berbasis Masyarakat (Pbm) Melalui Awig-Awig Di Lombok Timur Dan Sasi Di Maluku Tengah. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 11, 46–54. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jis.%v.%i.%Y.379-385>
- Subagja, B., & Ardianto, D. T. (2025). Revitalisasi Sejarah Maritim: Penggunaan Bahan Ajar Digital untuk Memperkuat Rasa Nasionalisme di Kalangan Siswa Sekolah Menengah Atas. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 14(2).
- Sudarto, S., Wardo, W., Sariyatun, S., & Musadad, A. A. (2025). Integrasi Pedagogi Reflektif dan Eco-Pedagogy dalam Konstruksi Kausalitas Sejarah: Membangun Kesadaran Nilai Lingkungan melalui Landscape Budaya dalam Pembelajaran Sejarah. *Jurnal Artefak*, 12(1), 213. <https://doi.org/10.25157/ja.v12i1.20669>
- Sulistiyono, S. T. (2016). Paradigma Maritim dalam Membangun Indonesia: Belajar dari Sejarah. *Lembaran Sejarah*, 12(2), 81. <https://doi.org/10.22146/lembaran-sejarah.33461>
- Susanti, A. D., Silaban, F., Aritonang, L. F., & Sitompul, Y. T. Y. br. (2025). Coral Reef Bleaching Crisis: Impacts on Indonesia's Marine Ecosystems And Coastal Economy. *Journal of Maritime Policy Science*, 2(1), 26–35. <https://doi.org/10.31629/jmps.v2i1.7351>
- Taufik, T., & Lailatussaadah, L. (2020). Peran Panglima Laot Dalam Mewujudkan Keberlanjutan Wisata Bahari Di Provinsi Aceh. *Asketik*, 4(2), 221–223. <https://doi.org/10.30762/ask.v4i2.2461>
- United Nations. (n.d.). *Sustainable development goals*. United Nations.
- Yanto, A., & Arif, W. (2023). Identitas Diri Sebagai Negara Maritim. *Indonesian Maritime Journal*, 11(1).